



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, Laporan Kinerja Instansi (LKj) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Kabupaten Tanah Laut di masa - masa mendatang..... Aamiin.

Pelaihari, 2 Januari 2025

Plt. Kepala Pelaksana

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Laut,**



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19820929 201406 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indicator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indicator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 3 (tiga) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2024 – 2026.

Indikator yang digunakan adalah indicator kinerja utama sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masyarakat yang terdampak bencana yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut.

Dalam pencapaian target kinerja BPBD Kab. Tanah Laut harus memberikan layanan secara prima. Adapun beberapa kegiatan yang mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut :

- Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana yang ada di Kab. Tanah Laut.
- Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.
- Pelatihan keluarga tanggap bencana alam.
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.
- Pelaksanaan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi mitigasi bencana kepada seluruh warga/masyarakat/kelompok masyarakat yang berada di daerah rawan bencana di Kab. Tanah Laut.
- Pemberian bantuan logistik bagi masyarakat yang terkena bencana.
- Pelatihan Pelaksanaan pelatihan Potensi SAR Pertolongan di Gunung Hutan (Jungle Rescue) dan Pelatihan pemadaman api di atas kapal laut.
- Penetapan status tanggap darurat pada tahun 2024 berdasarkan kaji cepat dan penyaluran bantuan logistik pada korban bencana yang terdampak pada tahun 2024 berupa kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa penanganan bencana.
- Penyusunan dokumen kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Koordinasi Pemulihan Pasca Bencana yang terjadi di Tahun 2023.

Demikian dengan disusunnya LAPKIN ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta evaluasi dalam pengambilan keputusan guna lebih mendorong peningkatan kinerja maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut di masa yang akan datang.

Pelaihari, 2 Januari 2025

**Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Laut,**



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19820929 201406 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum	2
D. Cascading Kinerja.....	3
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	14
F. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	17
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....	17
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	19

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	22
B. Strategi dan Arah Kebijakan	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	28
1. Sasaran Meningkatnya Penanggulangan Bencana Daerah	28
2. Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah	27
B. Akuntabilitas Keuangan.....	31
1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024.....	31
2. Anggaran dan Realisasimenurut Sasaran dan Program	34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Strategi Peningkatan Kinerja	39

LAMPIRAN

IKU

Pernyataan hasil Reviu

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Cascading/Pohon Kinerja

Capaian per triwulan (1-4)

Monev Renstra

Matrik Keselarasan

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Cascading BPBD Kab. Tanah Laut	3
Tabel 1.2	Jumlah ASN Pergolongan / Pendidikan Tahun 2024.....	17
Tabel 1.3	Matrik Tindak Lanjut Evaluasi Sakip 2024	19
Tabel 2.3.	Tujuan dan Sasaran Strategis.....	21
Tabel 2.2.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	25
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja 2024.....	26
Tabel 3.1.	Target dan Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut	29
Tabel 3.2.	Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut dengan PD Lain	29
Tabel 3.3.	Realisasi Keuangan Sasaran Strategis	30
Tabel 3.4.	Kejadian Bencana di Kab. Tanah Laut Tahun 2024	33
Tabel 3.5.	Data Kerusakan Akibat Bencana 2024	37
Tabel 3.6.	Target dan Capaian Nilai SAKIP BPBD	40
Tabel 3.7	Realisasi Keuangan Sasaran Strategis	40
Tabel 3.8.	Capaian Nilai SAKIP BPBD dengan SKPD Lain.....	41
Tabel 3.9.	Realisasi Belanja Pegawai 2024	45
Tabel 3.10.	Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2024.....	45
Tabel 3.11.	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 SOTK BPBD Kab. Tanah Laut	14
Gambar 1.2. SDM BPBD Kab. Tanah Laut	18
Gambar 3.1. Pemetaan Wilayah Rawan Bencana.....	30
Gambar 3.2. Peningkatan Kapasitas TRC BPBD	34
Gambar 3.3. Penyerahan Bantuan Logistik Terhadap Korban Bencana.....	36

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Atas dasar tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut menyusun Laporan Kinerja (LKj) secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut tahun 2024 adalah sebagai berikut berikut ini:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2024.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut tahun 2024 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Cascading Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut adalah salah satu Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang mengampu sasaran strategis daerah. Adapun cascading kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Tabel 1.1. Cascading BPBD Kab. Tanah Laut



Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program	Indikator
Terwujudnya ketangguhan daerah atas resiko bencana					Indeks Risiko Bencana (IRB)
	Terwujudnya kualitas ketahanan daerah atas bencana				Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
		Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana		Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana
					Persentase SDM TRC BPBD yang tersertifikasi keahlian dalam penanggulangan bencana
		Meningkatnya kualitas penanggualang kedaduratan bencana			Persentase aduan layanan keadaruratan bencana yang ditindaklanjuti (pencarian, pertolongan, evakuasi dan bantuan logistik)
		Meningkatnya daerah yang dipulihkan pasca bencana			Persentase Daerah yang dipulihkan pasca bencana
			Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kot	Persentase masyarakat yang memahami tahap mitigasi bencana
			Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kot	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi
			Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Sosialisasi, Komunikasi, Informasidan Edukasi (KIE) Relawan Bencana Kabuopaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Masyarakat yang diberikan Sosialisasi KIE
			Meningkatnya Status Desa Terkait Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana
			Meningkatnya Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana BPBD		Persentase SDM BPBD yang Lulus Sertifikasi Keahlian (Tahun n)
			Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program	Indikator
			strategis Kab/Kot untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		
			Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kab/Kot yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya
			Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kab/Kot (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi
			Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kab/Kot yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan
			Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kab/Kot yang sah dan legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi
			Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
			Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kab/Kot	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kab/Kot yang tertangani
			Penanggulangan Bencana (RPB) Kab/Kot yang sah dan legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kab/Kot sampai dengan dinyatakan sah/legal

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program	Indikator
			Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kab/Kot	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya
			Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kot	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
			Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya
			Meningkatnya kualitas sistem komando penanganan darurat bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pos penanggulangan bencana yang berfungsi dengan baik
			Meningkatnya kualitas kesiapan peralatan dan logistik.		Persentase peralatan dan logistik kebencanaan dalam kondisi siap
			Terwujudnya respon cepat penanggulangan bencana		Persentase Penetapan Status Darurat Bencana berdasarkan kaji cepat kurang dari 3 x 24 jam
			Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
			Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program	Indikator
			Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
			Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal
			Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kab/Kot dan lintas perangkat daerah Kab/Kot yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kab/Kot	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kab/Kot dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis
			Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan epidemiologi Terpadu
			Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kab/Kot	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Kualitas Data Kebutuhan Pasca bencana	Penataan Sisitem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Data Kejadian Bencana yang divalidasi
			Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan pasca bencana		Persentase Sektor kebutuhan bencana yang terpenuhi
			Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program	Indikator
			Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
			Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi
			Tersedianya Aparatur BPBD Kab/Kot dan lintas perangkat daerah Kab/Kot yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kab/Kot	Jumlah Aparatur BPBD Kab/Kot dan lintas perangkat daerah Kab/Kot yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
			Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kot	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kot sampai dengan dinyatakan sah/legal

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program	Indikator
			Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kab/Kot	Koordinasi penanganan Pascabencana Kab/Kot	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kot yang dilegalkan
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kab/Kot	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kab/Kot meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga ilantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia saha yang telah terdaftar dan legal
			Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana
			Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan Sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program	Indikator
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah					Nilai SAKIP Kabupaten
	Meningkatnya kinerja tata kelola Perangkat daerah yang akuntabel				Nilai SAKIP BPBD
		Meningkatnya kualitas perencanaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai komponen perencanaan	
		Meningkatnya kualitas pengukuran		Nilai komponen pengukuran	
		Meningkatnya kualitas pelaporan		Nilai komponen pelaporan	
		Meningkatnya kualitas evaluasi internal		Nilai komponen evaluasi internal	
		Meningkatnya kualitas layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah		Hasil survei pelayanan kesekretariatan	
			Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu
			Meningkatnya Keselarasan dokumen Perangkat Daerah dengan Pemda		Persentase Keselarasan sasaran Perangkat Daerah dengan RPJMD
			Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja perangkat daerah		Persentase hasil monev kinerja yang ditindaklanjuti
			Meningkatnya Kualitas Dokumen pelaporan Lingkup Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Pelaporan Lingkup Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu
			Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP		Persentase rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program	Indikator
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
			Meningkatnya kualitas layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
			Terpenuhinya layanan administrasi umum perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum sesuai SOP
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
			Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program	Indikator
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
			Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
			Terpenuhinya layanan administrasi umum perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi umum sesuai SOP
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

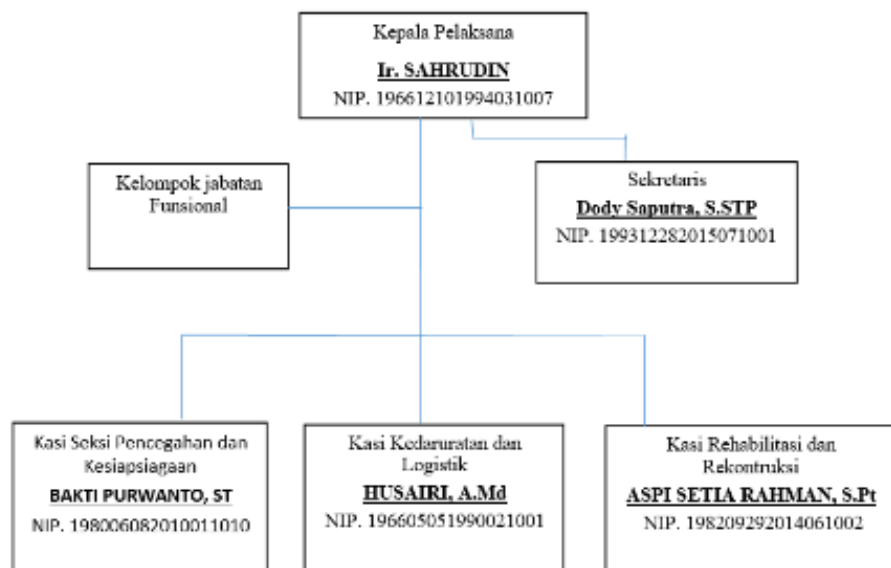
Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program	Indikator
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara



E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 1.1. SOTK BPBD Kab. Tanah Laut



BPBD Kabupaten Tanah Laut merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi BPBD terdiri dari Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris Badan, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kasi Kedaruratan dan Logistik, Kasi rehabilitasi dan Rekonstruksi. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing masing jabatan tersebut adalah :

1. Kepala Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya;

- b. merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan pembinaan teknis penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan kemitraan dalam peningkatan penanganan penanggulangan bencana;
 - e. membina, mengawasi dan mengendalikan program penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan prundang-undangan;
 - f. membuat laporan kinerja bidang penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya kepada Bupati; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan;
 - c. Penyelenggaraan urusan umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
 - h. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.
3. Seksi Mitigasi Bencana dalam menjalankan tugas menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan mitigasi bencana;
 - c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana;
 - d. Pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;

- e. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
 - f. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
 - g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian upaya pengurangan resiko bencana; dan
 - h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana.
4. Seksi Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana. Seksi kedaruratan bencana dan Operasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
 - c. Penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
 - d. Pengkoordinasian operasional penanggulangan bencana;
 - e. Penyelenggaraan analisis dan pengkoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
 - f. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
 - g. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat; dan
 - h. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian sistem komunikasi kebencanaan; dan
 - i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana.
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan rehabilitasi. Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja rehabilitasi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi;
 - c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rehabilitasi;
 - d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada

wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;

- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja rehabilitasi

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPBD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan Indeks risiko bencana (IRB) di Kabupaten Tanah Laut
2. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
4. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan bekerjasama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
6. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
7. Penyediaan dana rencana kontigensi dengan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

G. Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran

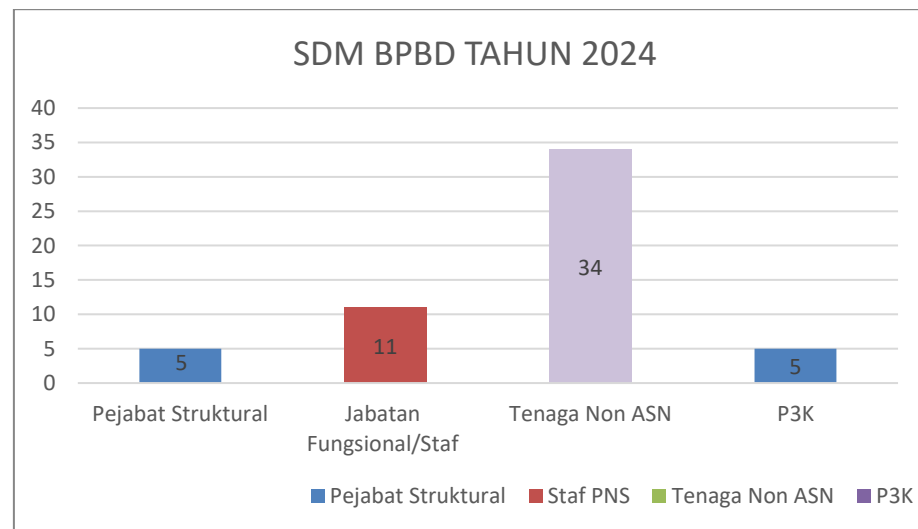
Jumlah ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2024

PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
1	8	8	-	5	22	1	5	2	-	14	-	-	22

jumlah kebutuhan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan peta jabatan adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) pegawai sehingga diperlukan tenaga non ASN untuk membantu pelaksanaan tugas agar BPBD dapat memberikan pelayanan secara prima dan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dan disepakati dengan pimpinan.

Gambar 1.2. SDM BPBD Kab. Tanah Laut



Berdasarkan pada table diatas terlihat bahwa terdapat 17 (tujuh belas) pegawai negeri sipil ditambah dengan 5 (lima) orang P3K dan 34 (tiga puluh empat) tenaga PTT dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Laut dengan sebutan Tenaga Administrasi 6 (enam) orang, Rescuer 25 (Dua puluh lima) orang dan Pusdalops PB 3 (tiga) orang yang ditempatkan di dikantor induk BPBD dan 3 (tiga) orang di Kecamatan Kintap.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, BPBD Kab. Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana sebanyak 480 unit peralatan dan 1 unit gedung kantor. Peralatan khusus penanganan dan penanggulangan bencana terdapat sebanyak 291 unit peralatan termasuk kendaraan bermotor.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga didukung oleh anggaran yang cukup memadai yaitu sebesar Rp. 6.452.069.342 yang terbagi dalam 2 (dua) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan.

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024 ada beberapa rekomendasi oleh APIP terkait pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh APIP dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.3

Matrik Tindak Lanjut Evaluasi Sakip 2024

No.	Komponen Kinerja	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Perencanaan Kinerja	Terhadap dokumen perencanaan agar diselarskan baik indikator kinerja maupun target kinerja yang telah ditetapkan (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan perbaikan dokumen perencanaan (penyelarsan indikator) dari renstra, renja,dan perjanjian kinerja	3 Dokumen (Renstra, Renja, PK)	Triwulan III Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Seluruh Kepala Seksi	Telah Dilakukan
		Target kinerja yang telah ditetapkan agar realistis dan dapat dicapai (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan perbaikan dokumen perencanaan (penyelarsan indikator dan target) dari renstra, renja,dan perjanjian kinerja	3 Dokumen (Renstra, Renja, PK)	Triwulan III Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Seluruh Kepala Seksi	Telah Dilakukan
		Terhadap dokumen perencanaan kinerja agar terus dilakukan perbaikan/ penyempurnaan (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3 Dokumen (Renstra, Renja, PK)	Triwulan III Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Seluruh Kepala Seksi	Telah Dilakukan
		Terhadap dokumen perencanaan agar dilakukan reuiu secara berkala dengan membuat laporan hasil reuiu sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan reuiu terhadap dokumen kinerja 1 (satu) tahun dalam sekali	1 Dokumen reuiu laporan kinerja.	Triwulan III Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	Telah Dilakukan
2	Pengukuran Kinerja	Agar dilakukan monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja dan dilakukan secara berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala – kendala dalam pencapaian target kinerja dan dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja (Rekomendasi tahun 2023)	telah dibangun sistem pengumpulan lengkap data capaian kinerja untuk memonitoring data capaian secara berkala	1 Dokuemen SK Penetapan/pro posal inovasi Sistem tempeleng tapaija	Triwulan III Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	Telah Dilakukan
		Perlunya pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakati (Rekomendasi tahun 2023)					Tidak Dilaksanakan

No.	Komponen Kinerja	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
		Hasil monitoring pencapaian kinerja yang dilakukan secara berkala agar dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja (Rekomendasi tahun 2023)	telah dibangun sistem pengumpulan lengkap data capaian kinerja untuk memonitoring data capaian secara berkala	1 Dokumen SK Penetapan/proposal inovasi Sistem tempeleng tapaija	Triwulan III Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	Telah Dilakukan
3	Pelaporan Kinerja	Laporan kinerja agar menyajikan analisis pada setiap pencapaian target kinerja dan menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan Laporan kinerja 2023	1 Dokumen Laporan Kinerja	Triwulan IV Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	Telah Dilakukan
		Laporan kinerja agar menginformasikan pencapaian target kinerja dan menyajikan target jangka menengah (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan Laporan kinerja 2023	1 Dokumen Laporan Kinerja	Triwulan IV Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	Telah Dilakukan
		Agar dalam Laporan Kinerja menyajikan pencapaian target kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja) (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan Laporan kinerja 2023	1 Dokumen Laporan Kinerja	Triwulan IV Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	Telah Dilakukan
		Laporan kinerja agar menyajikan kualitas atas keberhasilan/ kegagalan/ hambatannya dalam mencapai target kinerja beserta upaya nyata/ rencana aksi (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan Laporan kinerja 2023 sesuai dengan permenpan 54 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Hasil asistensi Kemenpan.	1 Dokumen Laporan Kinerja	Triwulan IV Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	Telah Dilakukan
		Laporan kinerja agar menyajikan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja	Telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan Laporan kinerja 2023	1 Dokumen Laporan Kinerja	Triwulan IV Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	Telah Dilakukan
		Laporan kinerja agar menyajikan perbaikan dan penyempurnaan kinerjanya	Telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan Laporan kinerja 2023	1 Dokumen Laporan Kinerja	Triwulan IV Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	Telah Dilakukan
		Agar Dilakukan reviu secara berjenjang atas laporan kinerja yang disusun sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai	Kesepakatan terhadap penyusunan Laporan Kinerja	1 dokumen Berita Acara	Triwulan I Tahun 2024	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	Telah Dilakukan
		Penunjukan petugas yang menangani pengumpulan data kinerja	telah dibangun sistem pengumpulan lengkap data capaian kinerja untuk memonitoring data capaian secara berkala	1 Dokumen SK Penetapan/proposal inovasi Sistem tempeleng tapaija	Triwulan III Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	Telah Dilakukan

No.	Komponen Kinerja	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan tindak lanjut atas evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022	1 dokumen matrik tindak lanjut	Triwulan I Tahun 2024	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	Telah Dilakukan
		Agar monitoring, evaluasi dan pemantauan terhadap rencana aksi pencapaian kinerja ditindak lanjuti untuk perbaikan kinerja (Rekomendasi tahun 2023)	dilakuakn money terkain pemenuhan tindak lanjut	1 Dokumen reuiu laporan kinerja.	Triwulan I Tahun 2024	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	Telah Dilakukan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024.
2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025.
4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi BPBD maka, BPBD termasuk dalam mendukung tujuan kedua yaitu Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan sasaran 2.7 yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana adalah Indeks Risiko Bencana.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka BPBD menetapkan tujuan dan sasaran yang dituankan pada Dokumen Rencana Strategis BPBD Tahun 2024-2026. Adapun tujuan BPBD adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana dan sasaran strategis BPBD adalah Meningkatnya Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator keberhasilan Indeks Ketahanan Daerah.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Realisasi Tahun 2023	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		Indeks resiko bencana	169,22	150,1	147	144
		Meningkatnya Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,51	0,58	0,59	0,60
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP Kabupaten	67,52	70,01	75	81,01
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai SAKIP BPBD	62,50	80,01	81	81,01

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut dalam melindungi masyarakat dari acaman bencana dan penanggulangan bencana memerlukan strategi dan arah kebijakan tertentu. Adapun strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut dalam menanggulangi bencana adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan upaya penerapan inovasi dalam pelayanan kebencanaan melalui penggunaan peralatan yang telah terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan.
- b. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan Kebencanaan.
- c. Melindungi masyarakat terdampak bencana melalui mitigasi bencana, penguatan kelembagaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi. Melalui penyelenggarakan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan berbagai pihak yang berkepentingan didalamnya diharapkan dapat memperbaiki, mengurangi kerusakan dan mengembalikan kondisi seperti semula sebelum terjadi bencana sehingga sasaran untuk meningkatkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat terwujud.
- d. Kebijakan BPBD Kabupaten Tanah Laut Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan bersama untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Selain dari strategi, diperlukan juga arah kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan dari organisasi, adapun arah kebijakan yang akan diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut dalam mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan inovasi dan kreatifitas stockholder terkait, masyarakat dan dunia usaha untuk 24ersama sama dalam menanggulangi bencana.
2. Mewujudkan kesiapsiagaan petugas TRC, Pusdalops PB dan Peralatan BPBD dan merespon Penanggulangan bencana.
3. Mewujudkan kesiapsiagaan seluruh stackholder terkait, masyarakat dan dunia usaha secara terencana dan terpadu.
4. Mewujudkan ketangguhan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

5. Melaksanakan pemulihan bencana melalui rehabilitasi dan rekontruksi yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha bersama-sama dengan instansi pemerintah, akademisi, TNI/polri maupun nasional maupun International.

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Meningkatnya Penanggulangan Bencana Daerah	Membangun sistem penanganan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Menyusun, RPB ,mitigasi, Sosialisasi, Edukasi, penyebaran informasi, pelatihan, bimtek terhadap aparat/masyarakat serta pemberdayaan masyarakat;
		Membangun sistem dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana yang handal	Melibatkan masyarakat dalam subjek dan obyek dalam upaya penanggulangan bencana
		Menyelenggarakan Penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyuluruh	Membangun jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam penanggulangan bencana, baik dari instansi pemerintah, swasta, akademisi, TNI/POLRI, maupun nasional dan internasional
		Menyelenggarakan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Membangun jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam rehabilitasi dan rekontruksi bencana
			Menyusun Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2024 telah disepakati bersama dan ditetapkan Perjanjian Kinerja Lingkup BPBD Kab. Tanah Laut sebagai berikut :

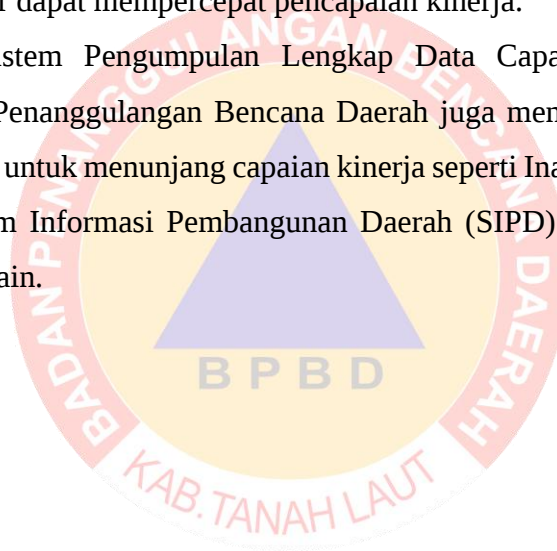
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja 2024

Kepala Pelaksana BPBD		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,58
Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP BPBD	80,01
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana	50%
	Persentase SDM TRC BPBD yang tersertifikasi keahlian kebencanaan (dari lembaga profesi yang BNPB)	25%
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas sistem kedaruratan bencana dan logistik	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan keaduratan (pencarian, pertolongan, dan evakuasi) dan bantuan logistik.	80%
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pemulihan bencana	Persentase Sektor Kebutuhan Bencana yang Dipulihkan	100%
Sekretaris		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja (SAKIP BPBD)	24
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (SAKIP BPBD)	10
Meningkatnya Layanan Administrasi perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian	100%
	Persentase Barang yang dapat digunakan (dalam kondisi baik)	80%

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati maka dibangun suatu sistem pengumpulan data capaian kinerja yang diberi nama Sistem Pengumpulan Lengkap Data Capaian Kinerja (Tempeleng Tapaija). Tempeleng Tapaija akan memudahkan para ASN BPBD Kab. Tanah Laut dalam mengumpulkan data realisasi kegiatan, data capaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa harus hadir di kantor dikarenakan kesibukan para ASN BPBD Kab. Tanah Laut dalam penanggulangan bencana di lapangan. Dengan menggunakan Tempeleng Tapaija maka pimpinan dapat memonitoring data capaian kinerja dan dapat memberikan instruksi langsung sesuai dengan arah kebijakan yang akan diambil agar dapat mempercepat pencapaian kinerja.

Selain Sistem Pengumpulan Lengkap Data Capaian Kinerja (Tempeleng Tapaija) Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga menggunakan aplikasi buatan pemerintah pusat untuk menunjang capaian kinerja seperti Inarisk dari BNPB, e-Kinerja dari BKN, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan laporan tahun ke lima atau tahun terakhir Renstra BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2018- 2024 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perbandingan juga dilakukan dengan kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya serta dengan kinerja yang dicapai oleh daerah lain apabila memungkinkan. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

1. Sasaran Meningkatnya Penanggulangan Bencana Daerah

Sasaran Strategis sesuai dengan rencana strategis BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKD merupakan komponen dalam penghitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), setelah terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. IKD dihitung berdasarkan 71 indikator yang terdiri dari 7 prioritas dan 284 pertanyaan. Untuk mengisi IKD, diperlukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bappeda, Litbang, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut pada tahun 2024 sebesar 0,65 adapun nilai tersebut diperoleh mulai dari *selfassesmen* oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui <http://inarisk.bnpb.go.id> kemudian dilakukan verifikasi bertahap oleh BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Adapun perbandingan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut dari tahun ketahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target dan Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut

Indikator Kinerja	Target Kinerja				Capaian Kinerja	
	2023	2024	2025	2026	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut	-	0,58	0,59	0,60	0,51	0,65

Dari table tersebut dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 0,14 atau sebesar 27,4 %. Persentasi capaian kinerja tahun 2024 (0,58) terhadap target kinerja pada tahun 2024 (0,65) adalah sebesar 112,06 %, sedangkan persentasi capaian kinerja tahun 2024 (0,65) terhadap target akhir restra (0,60) adalah sebesar 108,3 %.

Adapun capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut tahun 2024 jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan kabupaten lainnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut dengan PD Lain

No	Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
1	Tanah Laut	0.65
2	Kotabaru	0.50
3	Banjar	0.69
4	Barito Kuala	0.48
5	Tapin	0.58
6	Hulu Sungai Selatan	0.48
7	Hulu Sungai Tengah	0.45
8	Hulu Sungai Utara	0.68
9	Tabalong	0.50
10	Tanah Bumbu	0.69
11	Balangan	0.59
12	Kota Banjarmasin	0.54
13	Kota Banjarbaru	0.53

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut berada pada urutan ke-4.

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Pelaksana BPBD Tahun 2024 di dukung melalui 2 Program yang terdiri atas 13 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Keuangan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.386.080.843	4.868.670.342	90,39%
		Program Penanggulangan bencana	1.246.764.615	478.980.690	38,42%
	J U M L A H		6.632.845.458	5.347.651.032	80,62%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada dalam mencapai target Indikator sasaran dengan hasil 112,06 % dan anggran yang terealisasi sebesar 80,62% sehingga terdapat efesiensi kinerja sebesar 31,44 %, dimana angka tersebut diperoleh dari hasil pengurangan antara persentasi capaian kinerja dikurang persentasi realisasi keuangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya penggunaan teknologi dan informasi oleh BPBD Kab. Tanah Laut seperti penggunaan alat komunikasi radio yang memudahkan dalam penyampaian informasi dan penyusunan kaji cepat bencana, sehingga informasi yang di dapat tanpa harus melakukan observasi kelapangan dan jumlah sarana prasarana yang diturunkan ke lapangan sudah sesuai dengan kebutuhan.

Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut tahun 2024 sesuai target yang telah ditetapkan tidak lepas dari usaha Aparatur yang ada di BPBD Kab. Tanah Laut serta pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan dengan baik. Adapun sasaran kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a) Meningkatkan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana

Indikator dari sasaran kegiatan meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana dengan target pada tahun 2024 adalah sebesar 50% dan capaian sebesar 0%

dan Persentase SDM TRC BPBD yang tersertifikasi keahlian dalam penanggulangan bencana dengan target pada tahun 2024 sebesar 20% dan pencapaian sebesar 0 %.

Gambar 3.1. Pemetaan Wilayah Rawan Bencana



Sesuai dengan Kajian Resiko Bencana Kab. Tanah Laut tahun 2018-2023 seluruh wilayah di Kab. Tanah Laut termasuk kedalam daerah rawan bencana sesuai dengan jenis bencananya masing-masing. Pada tahun 2024 BPBD Kab. Tanah Laut melaksanakan pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana yang ada di Kab. Tanah Laut sebanyak 72 titik lokasi. Pelaksanaan pemetaan tersebut dilakukan oleh Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan menggunakan aplikasi *SW Maps*, pemetaan tersebut dalam rangka melakukan *updateting* data daerah rawan bencana. Setelah pemetaan maka dilakukan penentuan daerah mana yang akan dilaksanakan pembinaan untuk nantinya akan dicanangkan menjadi desa tangguh bencana sesuai dengan jenis bencananya masing-masing.

BPBD Kab. Tanah Laut melakukan pembinaan kepada kawasan kecamatan Bumi Makmur, pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dilakukan dalam dua kali pertemuan dilaksanakan di Kecamatan Bumi Makmur. Tema pada pertemuan pertama adalah Sosialisasi dan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) dengan Peserta terdiri dari 2 orang perwakilan masing-masing desa di Kecamatan Bumi Makmur serta pegawai kecamatan dengan jumlah total peserta sebanyak 25 orang pada tanggal 6 Juni 2024. Tema kedua adalah Relawan Penanggulangan Bencana, Pengkajian Risiko Bencana, Manajemen Kebencanaan, dan Pengurangan Kerentanan di Desa dengan peserta Peserta pada Sesi II merupakan perwakilan dari lima desa terpilih,

yaitu Handil Maluka, Sungai Rasau, Handil Babirik, Handil Gayam, dan Handil Labuan Amas dengan masing-masing desa diwakili oleh 4 orang, serta pegawai kecamatan dengan jumlah total peserta sebanyak 25 orang pada tanggal 21 Agustus 2024.

Setelah dilakukan pembinaan maka ada 2 (dua) desa yaitu Desa Sungai Rasau dan Desa Handil Birayang Bawah, yang memiliki potensi untuk dicanangkan menjadi desa tangguh bencana. BPBD Kab. Tanah Laut telah melakukan koordinasi dan komunikasi kepada BNPB melalui BPBD Prov. Kalimantan Selatan untuk penetapan 2 (dua) desa tersebut untuk menjadi desa tangguh bencana, akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2024 belum ada tanggapan.

Selain untuk pembinaan desa tangguh bencana BPBD Kab. Tanah Laut juga melaksanakan pelatihan mitigasi ke daerah rawan bencana lainnya antara lain :

- Pelatihan keluarga tanggap bencana alam dengan tema Peran Keluarga Dalam Kesiapsiagaan Bencana di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur. Narasumber kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam dengan tema Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana (Katana) adalah Rio Nanang Hermawan, S.T., M.T yang berasal dari BPBD Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki kompetensi sebagai pengajar (ToT) beserta asistennya Syaufi Rahman, S.Sos. Peserta kegiatan pelatihan Katana berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang perempuan anggota PKK Desa Sungai Rasau, 1 (satu) orang laki-laki anggota PKK Desa Sungai Rasau, Kasun III Desa Sungai Rasau (laki-laki) dan 1 (satu) orang laki-laki anggota TP PKK Kabupaten.
- Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dilaksanakan pada tiga lokasi yang berbeda. Pada Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati dengan peserta pelatihan berjumlah 25 orang peserta yang terdiri dari kader posyandu, pemerintah desa, PKK desa, serta ketua RT setempat. Pada Desa Kali Besar Kecamatan Kurau Peserta pelatihan adalah 25 orang peserta yang terdiri dari Kader PKK, kader posyandu, pemerintah dusun, ketua RT setempat, dan pemerintah desa. Pada Desa Kintapura Kecamatan Kintap Peserta pelatihan adalah 25 orang peserta yang

terdiri dari perwakilan lima RT setempat yang sering mengalami banjir. Narasumber kegiatan adalah Isella Loviana, S.Psi, M.Psi, Psikolog selaku Psikolog RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan materi Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Masyarakat wilayah rawan bencana di Kabupaten Tanah Laut Memberikan pengetahuan dan keterampilan pada peserta kegiatan dalam memberikan penanganan dan pendampingan psikologis pada korban bencana. Peserta kegiatan dapat menangani dan memberikan pendampingan psikologis pada korban bencana.

- Pelaksanaan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi mitigasi bencana kepada seluruh warga/masyarakat/kelompok masyarakat yang berada di daerah rawan bencana di Kab. Tanah Laut. Adapun mitigasi bencana yang disosialisasikan adalah bencana banjir dan bencana kekeringan serta kebakaran hutan yang mana jenis bencana tersebut lah yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi mitigasi bencana dilakukan BPBD Kab. Tanah Laut melalui kegiatan tatap muka, melalui media cetak dan elektronik, melalui kegiatan Tanah Laut Expo dan melalui siaran radio.

Sedangkan untuk indikator Persentase SDM TRC BPBD yang tersertifikasi keahlian dalam penanggulangan bencana pada tahun 2024 tidak tercapai dikarenakan untuk uji kompetensi dari Basarnas tidak tersedia. BPBD Kab. Tanah Laut hanya melakukan pelatihan Pelaksanaan pelatihan Potensi SAR Pertolongan di Gunung Hutan (Jungle Rescue) selama tanggal 4-9 Maret 2024 sebanyak 18 orang dengan instruktur pelatihan berasal dari tim BASARNAS. Adapun materi yang diberikan berupa Pengantar Pertolongan Pertama dan Referensi Anatomi, Kegawatdaruratan Lingkungan, dan Pemindahan Korban, Penilaian Korban , Cedera Alat Gerak, dan Pendarahan, Shock, dan cedera Jaringan Lunak, Bantuan Hidup Dasar dan Resusitasi Jantung Paru dan Cedera Kepala, Leher dan Tulang Belakang, Teknik Pencarian dan Survival.

Gambar 3.2. Peningkatan Kapasitas TRC BPBD



BPBD Kab. Tanah Laut juga mengirim anggota TRC BPBD untuk mengikuti pelatihan pemadaman api di atas kapal laut dari tanggal 1- 3 Juli 2024 yang dilaksanakan oleh Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan Palembang sebanyak 13 orang.

b) Meningkatnya Kualitas Penanggulang Kedaduratan Bencana

Indikator dari Meningkatnya kualitas penanggulang kedaduratan bencana adalah Persentase aduan layanan kedaduratan bencana yang ditindaklanjuti (pencarian, pertolongan, evakuasi dan bantuan logistik) dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% dan capaian sebesar 94,26%. Kejadian bencana di Kab. Tanah Laut pada tahun 2024 tidak terlalu *intens* seperti beberapa tahun sebelumnya, untuk penetapan status tanggap darurat pada tahun 2024 berdasarkan kaji cepat hanya terjadi 1 (satu) kali yaitu kejadian Banjir ROB yang terjadi di Pesisir Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur melalui Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/1493-KUM/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir ROB di Kawasan Pesisir Desa Sungai Rasau dan Desa Pantai Harapan Kab. Tanah Laut Tahun 2024. Pada awal tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi (banjir, angin kencang dan tanah longsor) dan pada bulan Desember 2024 BPBD Kab. Tanah Laut melakukan aktivasi pos siaga darurat bencana hidrometeorologi (banjir, angin kencang dan tanah longsor) guna melakukan antisipasi keadaan darurat bencana yang beranggatakan

TRC BPBD Kab. Tanah Laut. Adapun rekapitulasi kejadian bencana pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kejadian Bencana di Kab. Tanah Laut Tahun 2024

Kejadian	Jumlah Kejadian	Jumlah Kejadian yang ditangani	Korban	
			KK	Jiwa
Banjir	7	7	1.216	3.862
Cuaca Ekstrem	23	23	59	190
Kebakaran hutan dan Lahan	49	42	-	-
Kebakaran Pemukiman dan Fasum	28	28	51	149
Pencarian dan Pertolongan	12	12	-	12
Gelombang Pasang/Abrasi	3	3	37	150
Jumlah	122	115		

Pelaksanaan penanganan bencana baik pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan oleh TRC. BPBD dibantu oleh Anggota SatpolPP dan Damkar, Anggota DPRKPLH, Anggota DISHUB, Anggota Keplolisian, Anggota TNI, dan Relawan Kebencanaan yang ada di Kab. Tanah Laut. Peralatan yang dimiliki oleh BPBD Kab. Tanah Laut dalam melakukan penanganan bencana sebanyak 291 unit, dengan 195 unit dalam kondisi baik, 53 unit kondisi rusak ringan, 0 unit kondisi rusak sedang, 43 unit kondisi rusak berat.

BPBD Kab. Tanah Laut juga memberikan bantuan logistik pada korban bencana yang terdampak pada tahun 2024 berupa kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa penanganan bencana. Adapun jumlah logistik yang ada di BPBD Kab. Tanah Laut selama Tahun 2024 dalam kondisi baik sebanyak 318 yang terdiri dari 200 paket sembako bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 100 paket sembako berasal dari pengadaan dari APBD Kab. Tanah Laut dan 18 paket sembako sisa tahun 2023. BPBD Kab. Tanah Laut juga memiliki 200 paket hygenkit, 30 paket kids ware antuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Gambar 3.3. Penyerahan Bantuan Logistik Terhadap Korban Bencana



BPBD Kab. Tanah Laut menyalurkan bantuan sebanyak 116 paket sembako kepada korban bencana cuaca ekstrem kebakaran pemukiman selama tahun 2024. Pada kejadian banjir BPBD Kab. Tanah Laut menyerahkan bantuan dari provinsi diberikan kepada 414 KK di Kintapura, 90 KK di Kintap, 249 KK di Kintap Kecil, Riam adungan 41 KK berupa air mineral 129 dos, 177 liter minyak goreng, 410 liter beras, mie instan 240 pcs, kid ware 9 paket, sabun cair 91 botol. Selain dari BPBD Kab. Tanah Laut pemberian bantuan logistik juga dilaksanakan oleh Dinsos Kab. Tanah Laut, PMI Kab. Tanah Laut dan Baznas Kab. Tanah Laut.

c) Meningkatnya Daerah Yang Dipulihkan Pasca Bencana

Indikator dari meningkatnya daerah yang dipulihkan pasca bencana adalah Persentase Daerah yang dipulihkan pasca bencana dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% dan capaian sebesar 100%. Daerah yang dipulihkan pasca bencana adalah bencana yang di terjadi di tahun n-1 atau tahun 2023. Berdasarkan data bencana di 2023 yang tervalidasi oleh Tim Jitupasna di 4 (empat) sektor ada sebanyak 294 kejadian. Koordinasi Pemulihan Pasca Bencana yang terjadi di Tahun 2023 dilakukan baik secara langsung menghubungi SKPD terkait juga dilaksanakan dengan cara melakukan rapat koordinasi bersama di Kantor BPBD (dikantor BPBD sebanyak 3 kali kegiatan : Kamis , 29 Februari 2024, Kamis, 16 Mei 2024 dan Selasa, 11 Juni 2024, sisanya dilakukan koordinasi melalui telfon maupun secara langsung

dengan cara mendatangi SKPD terkait pengaku kegiatan sesuai masing-masing sektor. Ada sebanyak 294 kejadian yang sudah terpantau dipulihkan (yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan di Tanah Laut. Setelah dilakukan koordinasi dengan SKPD terkait, dilakukan pengamatan secara langsung kelapangan diketahui dari beberapa sektor pasca bencana yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan sudah terpantau dipulihkan dan kebanyakan dipulihkan secara mandiri oleh penyitas. Kendala yang ditemui dilapangan dalam melakukan pendataan adalah Koordinasi permintaan data pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan oleh Intansi/ SKPD terkait masih cukup sulit dilaksanakan dan permintaan data secara langsung ke penyitas pun cukup sulit dan selalu butuh pendekatan yang lebih mendalam kepada masing-masing penyitas. Untuk Permukiman yang rusak akibat bencana kebakaran maupun angin puting beliung sudah dupilihkan sendiri oleh pemiliknya dan dibantu oleh Dinas Sosial ataupun Baznas dan untuk kerusakan sarana dan prasarana yang rusak juga sudah terpantau diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Instansi/ SKPD terkait. Dinsos sebanyak 40 Rumah melalui danan BTT, DPRKPLH sebanyak 113 rumah melalui APBD Kabupaten Tanah Laut maupun APBD Propinsi Kalsel.

BPBD Kab. Tanah Laut melakukan penyusunan dokumen kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA). Jitupasna adalah kegiatan untuk menilai dan mengkaji akibat bencana, menganalisis dampak, dan memperkirakan kebutuhan dalam melakukan rehabilitasi serta rekonstruksi. Dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 pada sektor pemukiman dan sektor ekonomi produktif. Adapun data kerusakan akibat bencana alam di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Data Kerusakan Akibat Bencana 2024

Kejadian	2024	
	Jumlah Kerusakan	Jumlah Kerugian
Banjir	1.140 Buah Rumah Terendam	1.265.910.000
Cuaca Ekstream	12 RR, 3 RS, 3 RB	
Kebakaran Pemukiman dan Fasum	13 RR, 3 RS, 29 RB	
Pencarian dan Pertolongan	-	-
Kebakaran hutan dan Lahan	253,6499 ha	82.043.553

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana dan mencapai target kinerja utama pada tahun 2024 mengalami beberapa kendala baik kendala internal ataupun kendala eksternal. Adapun beberapa kendala yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- a) struktur organisasi tata kelola BPBD Kab. Tanah Laut masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana Sekretaris BPBD Kab/Kota dengan typologi B adalah pejabat struktural eselon IV/a dan tidak memiliki Kepala Sub Bagian. Sehingga hal tersebut membuat beban kerja sekretaris BPBD Kab. Tanah Laut menjadi besar dengan beban tugas perencanaan, keuangan, pelaporan, umum, kepegawaian, kearsipan dan pengadaan barang dan jasa tanpa ada pejabat struktural yang membantu. Sedangkan beban kerja BPBD kab/kota sudah setara dengan SKPD yang lain. Hal tersebut juga berdampak di bidang yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana yang hanya dijabat oleh kepala seksi, sehingga SDM yang menjalankan fungsi administrasi sekaligus melaksanakan kegiatan (diluar pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana) sangat terbatas.
- b) Pada pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana pada tahun ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat kendala. Kendala tersebut yaitu kurangnya Lembaga/Instansi serta penyedia yang dapat melaksanakannya. Sedangkan untuk personil SDM internal BPBD tidak memenuhi syarat dalam penyusunan Kajian Resiko Bencana yang sudah ditentukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- c) Belum lengkapnya SOP terkait penanganan bencana.

Berdasarkan kendala dilapangan maka BPBD telah menyusun beberapa langkah-langkah yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya kembali kendala tersebut ditahun 2025. Adapun beberapa kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan manajemen resiko tahun 2025 yang telah ditetapkan BPBD adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan konsultasi dengan bagian organisasi terkait kesiapan dan perhitungan kematangan SKPD terkait peningkatan typologi SKPD.

- b) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BKPSDM terkait SDM (pengadaan P3K, perhitungan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur)
- c) Melakukan koordinasi dengan BNPB terkait Lembaga/Instansi/Penyedia yang memenuhi syarat pelaksanaan kajian resiko bencana.
- d) Melakukan penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan penyusunan kajian rencana penanggulangan bencana, dan penyusunan dokumen rencana kontijensi sesuai dengan jenis bencana yang ancaman tinggi di Kabupaten Tanah Laut.
- e) Mendistribusikan secepat mungkin logistik kepada masyarakat yang terdampak bencana maksimal 1 hari setelah terjadi bencana.
- f) Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait bencana di daerah rawan bencana.
- g) Menyusun Peraturan Bupati terkait turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 3 tahun 2023 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis sesuai dengan rencana strategis BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2024-2026 yang kedua adalah Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah dengan indikator nilai SAKIP BPBD. SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. SAKIP diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban instansi pemerintah, setiap organisasi diwajibkan untuk mencatat dan melaporkan penggunaan keuangan negara, serta memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. SAKIP memiliki beberapa tujuan, di antaranya: Penerapan Reformasi Birokrasi, Penerapan Zona Integritas, Pencapaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Pencapaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Nilai SAKIP BPBD pada tahun 2024 sebesar 78,45 , nilai tersebut diperoleh berdasarkan pembobotan 4 komponen evaluasi sakip oleh Inspektorat Kab. Tanah Laut terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Adapun hasil evaluasi Inspektorat Kab. Tanah Laut melalui aplikasi

SAKUNTALA perencanaan kinerja sebesar 23,70 , pengukuran kinerja sebesar 24,00 , pelaporan kinerja sebesar 12,00 dan evaluasi kinerja sebesar 18,75

Adapun perbandingan Nilai SAKIP BPBD dari tahun ketahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Target dan Capaian Nilai SAKIP BPBD

Indikator Kinerja	Target Kinerja		Capaian Kinerja	
	2023	2024	2023	2024
Nilai SAKIP BPBD	-	80,01	62,50	78,45

Dari table tersebut dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 15,95 atau sebesar 25,52 %. Persentasi capaian kinerja tahun 2024 (78,45) terhadap target kinerja pada tahun 2024 (80,01) adalah sebesar 98,05 %, sedangkan persentasi capaian kinerja tahun 2024 (78,45) terhadap target akhir restra (81,01) adalah sebesar 98,83 %.

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2024 di dukung melalui Program Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Keuangan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.386.080.843	4.868.670.342	90,39%
	J U M L A H		5.386.080.843	4.868.670.342	90,39%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada dalam mencapai target Indikator sasaran dengan hasil 98,05 % dan anggran yang terealisasi sebesar 90,39% sehingga terdapat efesiensi kinerja sebesar 7,66 %

Adapun capaian Nilai SAKIP BPBD tahun 2024 jika dibandingkan dengan Nilai SAKIP Kabupaten dan SKPD lainnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.8
Capaian Nilai SAKIP BPBD dengan SKPD Lain

No.	Nama Dinas	Nilai Hasil Evaluasi	Tingkat Akuntabilitas Kinerja
1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	83,90	A
2	Dinas Perhubungan	82,90	A
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	82,85	A
4	Sekretariat Daerah	82,45	A
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	82,10	A
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	82,00	A
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	82,00	A
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81,95	A
9	Dinas Pariwisata	81,95	A
10	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	81,95	A
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,80	A
12	Inspektorat Kabupaten	81,80	A
13	Dinas Kesehatan	81,50	A
14	Badan Pendapatan Daerah	81,50	A
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	81,40	A
16	Sekretariat DPRD	81,20	A
17	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	81,20	A
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81,10	A
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	80,60	A
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	79,55	BB
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	79,20	BB
22	Dinas Sosial	79,10	BB
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	79,10	BB
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	79,05	BB
25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan	79,05	BB
26	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	78,85	BB
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78,65	BB
28	Kecamatan Takisung	78,50	BB
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78,45	BB
30	Kecamatan Bajuin	77,45	BB
31	Kecamatan Pelaihari	77,10	BB
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77,00	BB
33	Kecamatan Panyipatan	76,10	BB
34	Kecamatan Tambang Ulang	75,95	BB
35	Kecamatan Jorong	75,85	BB
36	Kecamatan Bati bati	75,60	BB
37	Kecamatan Batu Ampar	75,50	BB
38	Kecamatan Bumi Makmur	72,10	BB
39	Kecamatan Kurau	68,30	B
40	Kecamatan Kintap	63,65	B

BPBD dalam melakukan meningkatkan akuntabilitas kinerja melakukan beberapa perubahan dan pelaksanaan kegiatan, antara lain :

- a) Melakukan penyesuaian Pohon kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyesuaian pohon kinerja BPBD dimulai dengan penentuan outcome yang akan dijabarkan dalam pohon kinerja, adapun outcome yang ditetapkan adalah Meningkatnya Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah yang sebelumnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Setelah penentuan outcome maka dilaksanakan penentuan Critical success factor (CSF) untuk mencapai target kinerja dari outcome tersebut. Penyesuaian pohon kinerja ini juga sudah melalui pendampingan oleh KemenpanRB, Bappeda Kab. Tanah Laut dan juga bagian organisasi.
- b) Penggunaan E-sakiptanahlaut hasil kajitiru Pemerintah kab. Tanah Laut dengan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan sebagai tools dalam membangun sistem akuntabilitas. Penggunaan E-sakiptanahlaut dimulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan keuangan, hingga pelaporan kinerja. Seluruh ASN yang mempunyai tanggung jawab dalam mengelola anggaran negara kan secara langsung melaporkan capaian target output/outcome beserta uraian keberhasilan dan kendala secara berkala. Hal ini sangat berbeda dengan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada tahun sebelumnya yang hanya menggunakan metode/aplikasi masing masing SKPD.
- c) Monitoring pencapaian kinerja tidak hanya dilakukan melalui aplikasi E-sakiptanahlaut akan tetapi juga melalui aplikasi e-kinerja yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara. Capaian target kinerja yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan perjanjian masing masing ASN dan dimonitoring pimpinan setiap bulannya. Pimpinan diwajibkan memberikan feedback terhadap capaian kinerja bawahannya.

Sesuai dengan rekomendasi APIP terkait pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 terdapat beberapa hal yang perlu di tingkatkan, hal tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Dalam Penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan
- b) Dalam menyusun perencanaan agar mengacu pada pohon kinerja yang telah disusun.
- c) Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja agar pimpinan memberikan umpan balik (feedback) yang jelas
- d) Dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan) agar membahas/terdokumentasi penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran
- e) Dalam melakukan perubahan Renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya
- f) Dalam penilaian SKP bulanan agar pimpinan memberikan umpan balik (feedback) yang berkelanjutan
- g) Dalam pemberian Reward dan Punishment agar menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar
- h) Laporan kinerja berkala (Monev per triwulan) yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran.
- i) Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- j) Agar segera menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2023, dengan melakukan input dokumen tindak lanjut pada aplikasi Sakuntala.
- k) Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja per triwulan tahun 2024 dengan melakukan input dokumen laporan hasil monev pada aplikasi Sakuntala.

Berdasarkan kendala atau rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud diatas maka BPBD telah menetapkan rencana aksi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, adapun rencana aksi tersebut sebagai berikut :

- a) Penyusunan Rencana Kerja berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Laporan Monev triwulan tahun 2024

- b) Perubahan Pohon kinerja sesuai dengan hasil rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten dan KEMENPANRB maka akan dilanjutkan dengan perubahan dokumen perencanaan
- c) Rapat internal yang dipimpin oleh kepala SKPD terkait pencapaian kinerja.
- d) Laporan monev harus memuat tentang penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran
- e) Renja perubahan berdasarkan hasil rapat internal evaluasi kinerja pertriwulan
- f) Pemberian umpan balik pimpinan yang detail dan jelas.
- g) Pemberian reward dan punisment terhadap TPP berdasarkan kinerja
- h) Reviu atas laporan kinerja mulai dari lingkup SKPD sampai dengan Tim SAKIP Pemda
- i) Penyusunan Laporan Monev pertriwulan terhadap capaian kinerja
- j) Penyusunan Laporan Kinerja dengan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut,
- k) Penyusunan rencana aksi berdasarkan rekomendasi APIP terhadap SAKIP BPBD 2023
- l) Penyusunan Laporan Monev pertriwulan terhadap capaian kinerja

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 6.632.845.458,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.347.651.032,00 atau 80,62% yang terdiri dari :

a) Belanja Operasi

Belanja operasi untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 5.157.003.604,00 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.535.681.344,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.621.322.260,00.

Jumlah realisasi Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp. 2.535.681.344,00 dan Rp. 2.209.735.809,00. Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanah Laut pada Tahun

Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 325.945.535,00 atau sebesar 14,75% dari tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Pegawai 2024

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.505.854.748,00	1.358.121.480,00	90,19	1.157.562.181,00	
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.363.296.998,00	1.177.559.864,00	86,38	1.052.173.628,00	
	Jumlah	2.869.151.746,00	2.535.681.344,00	88,38	2.209.735.809,00	15

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp. 2.621.322.260,00 dan Rp. 2.197.613.806,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 423.708.454,00 atau sebesar 19% dari tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.10. Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2024

No	Uraian	TA. 2024			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Barang Pakai Habis	562.333.122,00	406.964.898,00	72,37	143.336.036,00	184
2	Belanja Jasa Kantor	1.354.776.587,00	1.070.044.465,00	78,98	1.125.450.342,00	(16)
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	69.476.676,00	54.308.292,00	78,17	56.045.111,00	(3)
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	300.000.000,00	0,00	0,00	232.310.000,00	0
6	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	60.000.000,00	60.000.000,00	100	0,00	0
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	409.750.000,00	403.589.967,00	98,50	400.511.957,00	1

No	Uraian	TA. 2024			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
8	Belanja Perjalanan Dinas	786.177.000,00	623.800.638,00	79,35	239.960.360,00	160
	Jumlah	3.559.386.322,00	2.621.322.260,00	73,65	2.197.613.806,00	19%

b) Belanja Modal

Belanja Modal untuk tahun 2024 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 113.580.190,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 90.727.200,00. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp. 108.070.000,00 dan Rp. 119.900.000,00. Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 81.937.428,00. Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Pompa	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	45.000.000,00	(60)
2	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	43.344.858,00	41.000.000,00	94,59	0,00	0
3	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00	0
4	Belanja Modal Alat Pembersih	8.959.075,00	8.800.000,00	98,22	0,00	0
5	Belanja Modal Personal Computer	18.407.630,00	18.300.000,00	99,42	31.500.000,00	(42)
6	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	15.728.427,00	13.940.000,00	88,63	5.000.000,00	179
7	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	3.294.746,00	2.960.000,00	89,84	0,00	0
8	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5.045.454,00	4.270.000,00	84,63	0,00	0
9	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	90.727.200,00	81.937.428,00	90,31	0,00	0
	Jumlah					

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 6.632.845.458. Dari anggaran tersebut telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program yang terdiri atas 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Dari semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah terealisasi dengan baik, Realisasi menurut sasaran dan Program tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 7.999.046 terealisasi sebesar Rp. 6.478.400 atau 80,99% dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 4.999.298 terealisasi sebesar Rp. 3.819.600 atau 76,40%
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.999.748 terealisasi sebesar Rp. 2.658.800 atau 88,63%
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.872.651.279 terealisasi sebesar Rp. 2.538.695.744 atau 88,37% dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.869.151.746 terealisasi sebesar Rp. 2.535.681.344 atau 88,38%
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.499.533 terealisasi sebesar Rp. 3.014.400 atau 86,14%
- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 999.734 terealisasi sebesar Rp. 950.400 atau 95,07%
- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 129.429.437 terealisasi sebesar Rp. 119.300.000 atau 92,17% dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 69.429.437 terealisasi sebesar Rp. 59.300.000 atau 85,41%
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000 terealisasi sebesar Rp. 60.000.000 atau 100%

- e) Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 590.800.714 terealisasi sebesar Rp. 567.160.646 atau 96,00% dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 34.730.268 terealisasi sebesar Rp. 25.984.500 atau 74,82%
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 71.399.105 terealisasi sebesar Rp. 68.430.008 atau 95,84%
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 4.997.843 terealisasi sebesar Rp. 3.978.500 atau 79,60%
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penganggotaan dengan anggaran sebesar Rp. 16.202.742 terealisasi sebesar Rp. 16.105.000 atau 99,40%
 - 5) Penyediaan Bahan/Material dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000 terealisasi sebesar Rp. 15.000.000 atau 100%
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 448.000.000 terealisasi sebesar Rp. 437.200.638 atau 97,59%
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 470.756 terealisasi sebesar Rp. 462.000 atau 98,14%
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 161.831.133 terealisasi sebesar Rp. 150.537.428 atau 93,02% dengan sub kegiatan :
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 71.103.933 terealisasi sebesar Rp. 68.600.000 atau 96,48%
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan dengan anggaran sebesar Rp. 90.727.200 terealisasi sebesar Rp. 81.937.428 atau 90,31%
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.101.881.685 terealisasi sebesar Rp. 998.082.757 atau 90,58% dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 55.605.009 terealisasi sebesar Rp. 26.374.465 atau 47,43%
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.046.276.676 terealisasi sebesar Rp. 971.708.292 atau 92,87%

- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 520.487.815 terealisasi sebesar Rp. 487.464.967 atau 93,66% dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000 terealisasi sebesar Rp. 29.917.300 atau 99,72%
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 400.998.450 terealisasi sebesar Rp. 373.419.227 atau 93,12%
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 89.489.365 terealisasi sebesar Rp. 84.128.440 atau 94,01%
- i) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 390.730.914 terealisasi sebesar Rp. 42.734.000 atau 10,94% dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 349.996.030 terealisasi sebesar Rp. 24.860.000 atau 7,10%
 - 2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan anggaran sebesar Rp. 40.734.884 terealisasi sebesar Rp. 17.874.000 atau 43,88%
- j) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 336.744.189 terealisasi sebesar Rp. 176.959.900 atau 52,55% dengan Sub Kegiatan:
- 1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 44.917.501 terealisasi sebesar Rp. 32.406.500 atau 72,15%
 - 2) Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan anggaran sebesar Rp. 99.110.396 terealisasi sebesar Rp. 49.847.250 atau 50,29%
 - 3) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 99.103.280 terealisasi sebesar Rp. 75.591.000 atau 76,27%
 - 4) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 49.113.120 terealisasi sebesar Rp. 234.600 atau 0,48%

- 5) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan anggaran sebesar Rp. 44.499.892 terealisasi sebesar Rp. 18.880.550 atau 42,43%
- k) Kegiatan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 397.210.973 terealisasi sebesar Rp. 149.008.000 atau 37,51% dengan sub kegiatan :
- 1) Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 245.685.000 terealisasi sebesar Rp. 43.110.000 atau 17,55%
 - 2) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban Bencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 51.625.973 terealisasi sebesar Rp. 44.098.000 atau 85,42%
 - 3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 99.900.000 terealisasi sebesar Rp. 61.800.000 atau 61,86%
- l) kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp. 122.078.539 dan terealisasi sebesar Rp. 110.278.790 atau sebesar 90,33%, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 50.890.000 terealisasi sebesar Rp. 50.160.000 atau 98,57%
 - 2) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 71.188.539 terealisasi sebesar Rp. 60.118.790 atau 84,45%

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui Laporan Kinerja (LKj) ini.

Pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sesuai Rencana Strategis BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2024-2026 yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut. Pada tahun 2024 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tanah Laut sebesar 0,65 adapun nilai tersebut diperoleh mulai dari *selfassesmen* oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui <http://inarisk.bn timer.go.id> kemudian dilakukan verifikasi bertahap oleh BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Persentasi capaian kinerja tahun 2024 (0,58) terhadap target kinerja pada tahun 2024 (0,65) adalah sebesar 112,06 % dan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 0,14 atau sebesar 27,4 % terhadap capaian tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk nilai SAKIP BPBD pada tahun 2024 sebesar 78,45, capain terhadap target kinerja pada tahun 2024 (80,01) adalah sebesar 98,05 %. nilai SAKIP BPBD pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 15,95 atau sebesar 25,52 % bila dibanding dengan tahun 2023.

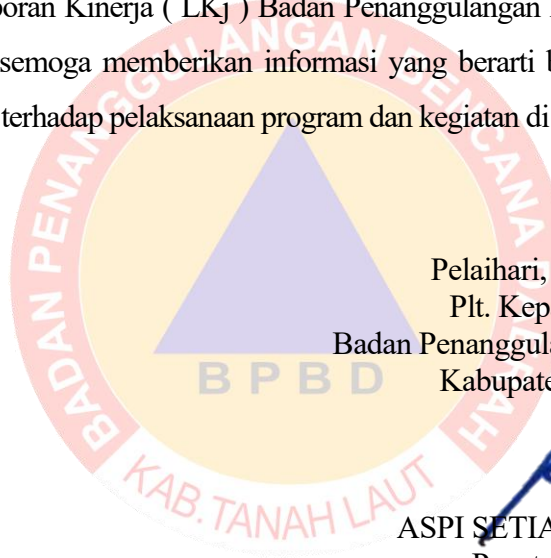
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dibuat dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sampai tahun 2024 masih banyak kendala-kendala yang harus dicarikan solusinya untuk peningkatan kinerja Permasalahan yang terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2024, adapun strategi peningkatan kinerja ditahun mendatang dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a) Melakukan konsultasi dengan bagian organisasi terkait kesiapan dan perhitungan kematangan SKPD terkait peningkatan typologi SKPD.
- b) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BKPSDM terkait SDM (pengadaan P3K, perhitungan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur)

- c) Melakukan koordinasi dengan BNPB terkait Lembaga/Instansi/Penyedia yang memenuhi syarat pelaksanaan kajian resiko bencana.
- d) Melakukan penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan penyusunan kajian rencana penanggulangan bencana, dan penyusunan dokumen rencana kontijensi sesuai dengan jenis bencana yang ancaman tinggi di Kabupaten Tanah Laut.
- e) Mendistribusikan secepat mungkin logistik kepada masyarakat yang terdampak bencana maksimal 1 hari setelah terjadi bencana.
- f) Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait bencana di daerah rawan bencana.
- g) Menyusun Peraturan Bupati terkait turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 3 tahun 2023 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut Tahun 2024, semoga memberikan informasi yang berarti bagi yang memerlukan serta menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.



Pelaihari, 2 Januari 2024

Plt. Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Laut,

ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19820929 201406 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512) (21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. SAHRUDIN**
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BPBD

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. SYAMSIR RAHMAN**
Jabatan : Pj. BUPATI TANAH LAUT

Selaku atasan dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI TANAH LAUT

H. SYAMSIR RAHMAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT

Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Penanggulangan Bencana Daerah	-	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,58
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	-	Nilai SAKIP BPBD	80,01

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 7.999.046	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.872.651.279	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 999.734	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 129.429.437	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 590.800.714	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 161.831.133	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.101.881.685	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 520.487.815	
2.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 390.730.914	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 336.744.189	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 397.210.973	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp. 122.078.539	
JUMLAH			Rp. 6.632.845.458	

Pelaihari, 19 September 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT

H. SYAMSIR RAHMAN

**KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT**

Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dody Saputra**
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Ir. SAHRUDIN**
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BPBD

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT

Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS

Dody Saputra
NIP. 19931228 201507 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	-	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja (SAKIP BPBD)	24
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	-	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (SAKIP BPBD)	10
	Meningkatnya Layanan Administrasi perkantoran	-	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian	100%
		-	Persentase Barang yang dapat digunakan (dalam kondisi baik)	80%

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 7.999.046	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.872.651.279	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 999.734	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 129.429.437	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 590.800.714	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 161.831.133	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.101.881.685	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 520.487.815	

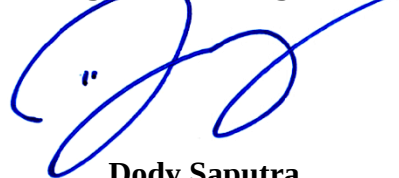
Pelaihari, 19 September 2024

KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT



Ir. SAHRUDIN
Nip. 19661210 199403 1 007

SEKRETARIS



Dody Saputra
NIP. 19931228 201507 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAKTI PURWANTO, ST**
Jabatan : KASI PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Ir. SAHRUDIN**
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BPBD

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT

Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007

PIHAK PERTAMA
KASI PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN

BAKTI PURWANTO, ST
NIP. 19800608 201001 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	-	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana	50%
		-	Persentase SDM TRC BPBD yang tersertifikasi keahlian kebencanaan (dari lembaga profesi yang BNPB)	25%

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ket
1.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 390.730.914	
		Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 336.744.189	

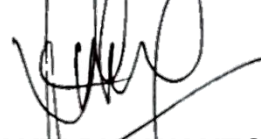
Pelaihari, 19 September 2024

KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT



Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007

KASI PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN



BAKTI PURWANTO, ST
NIP. 19800608 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512) (21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAKTI PURWANTO, ST**
Jabatan : **Plt.KASI KEDARURATAN & LOGISTIK**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. SAHRUDIN**
Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT

Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007

PIHAK PERTAMA
Plt. KASI KEDARURATAN
DAN LOGISTIK

BAKTI PURWANTO, ST
NIP. 19800608 201001 1 010

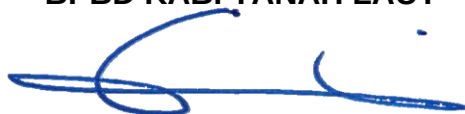
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
			Sebelum
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas sistem kedaruratan bencana dan logistik	- Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan keedaruratan (pencarian, pertolongan, dan evakuasi) dan bantuan logistik.	80%

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ket
1.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 397.210.973	

Pelaihari, 19 September 2024

KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT



Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007

Pit. KASI KEDARURATAN
DAN LOGISTIK



BAKTI PURWANTO, ST
NIP. 19800608 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512) (21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt**
Jabatan : KASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Ir. SAHRUDIN**
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BPBD

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT

Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007

PIHAK PERTAMA
KASI REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI

ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt
NIP. 19820929 201406 1 002

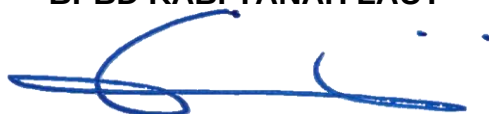
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemulihan bencana	Persentase Sektor Kebutuhan Bencana yang Dipulihkan	100%

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ket
1.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp. 122.078.539	
JUMLAH			Rp. 124.814.539	

Pelaihari, 19 September 2024

**KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT**



Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007

**KASI REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI**



ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt
NIP. 19820929 201406 1 002

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2024

Kabupaten
Nama SKPD

: Tanah Laut
: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tugas

: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebencanaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Fungsi

- : Perumusan kebijakan teknis di bidang kebencanaan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati
: a. berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang kebencanaan, baik pra bencana, tanggap darurat bencana, paska bencana, serta penanganan pengungsi secara cepat, dan dapat dipertanggung jawabkan
- c. Pembinaan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian pelaksana teknis
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Terwujudnya kualitas ketahanan daerah atas bencana	1 Indeks Ketahanan Daerah	Nilai Indeks Ketahanan Daerah berdasarkan capaian 71 indikator ketahanan daerah pada 7 sektor	BPBD/BNPB



MONITORING HASIL CAPAIAN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN 2024	TARGET KINERJA				ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA								CAPAIAN AKHIR		
			TW 1	TW2	TW3	TW4		(Rp)	TW 1		TW2		TW3		TW4		Kinerja	(Rp)
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	8	8	
A.1. Terwujudnya kualitas ketahanan daerah atas bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,58	-	-	-	0,58	1.246.764.615 5.386.080.843	0	1.418.464.008	0	1.321.093.960	0	1.194.583.198	0,65	1.413.309.866	0,65	5.347.451.032,00	
a.1.1. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana	50%	-	-	-	50%	390.730.914	0%	2.395.000	0%	9.021.000	0%	9.030.000	0%	22.288.000	0%	42.734.000	
	Persentase SDM TRC BPBD yang tersertifikasi keahlian dalam penanggulangan bencana	25%	-	25%	25%	25%	336.744.189	0%	84.188.500	0%	23.930.850	0%	62.440.550	0%	6.400.000	0%	176.959.900	
a.1.2. Meningkatnya kualitas penanggulangang kedaduratan bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan keaduratan (pencarian, pertolongan, dan evakuasi) dan bantuan logistik.	80%	80%	80%	80%	80%	397.210.973	80%	37.048.000	80%	55.020.000	80%	17.020.000	80%	39.920.000	80%	149.008.000	
a.1.3. Meningkatnya daerah yang dipulihkan pasca bencana	Persentase Sektor Kebutuhan Bencana yang Dipulihkan	100%	-	-	50%	100%	122.078.539		19.012.000		24.827.790	50%	31.470.000	50%	34.969.000	100%	110.278.790	
B.1. Meningkatnya kinerja tata kelola Perangkat daerah yang akuntabel	Nilai SAKIP BPBD	80,01	-	-	-	80,01	5.386.080.843	0	1.275.820.508	0	1.208.294.320	0	1.074.622.648	78,45	1.309.732.866	78,45	4.868.470.342	
b.1.1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan	Nilai komponen perencanaan	24	-	-	-	24		0		0		0		23,70				
b.1.1.2. Meningkatnya kualitas pelaporan	Nilai komponen pelaporan	10	-	-	-	10		0		0		0		12,00				
b.1.1.3. Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian	100%	-	-	-	100%		0		0		100%						
	Persentase Barang yang dapat digunakan (dalam kondisi baik)	80%	80%	80%	80%	80%		80%		80%		80%						